

## **BAB I**

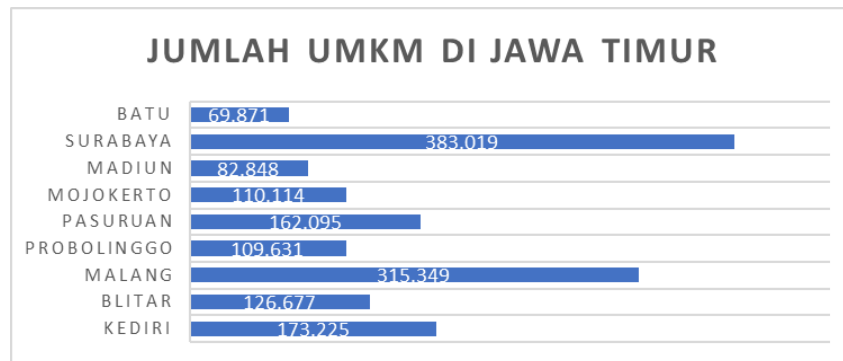
### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan perekonomian nasional dengan cara mengembangkan potensi dari sumber daya manusia maupun alam yang telah ada dengan mengolahnya sebaik mungkin. Melalui UMKM, masyarakat di Indonesia ini diharapkan mampu menciptakan produk – produk lokal yang tidak kalah menarik serta memiliki kualitas yang baik agar dapat bersaing dengan kompeten sehingga secara mandiri dapat memperluas kesempatan usaha maupun lapangan pekerjaan agar tidak selalu bergantung kepada pemerintah .

Jumlah pelaku UMKM akan terus mengalami pertumbuhan termasuk di Kota Surabaya yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pemerintah Kota Surabaya terus mendukung dengan melakukan yang terbaik untuk masyarakat yang memiliki UMKM karena tanpa disadari banyak bisnis besar yang dimulai dari usaha yang kecil sehingga dapat menunjukkan bahwa UMKM merupakan awal pertumbuhan perusahaan yang besar dan juga UMKM dapat menjadi sarana tanpa batas yang mampu menampung seluruh kreatifitas dan inovasi dari setiap orang yang membuka usaha sehingga dapat ditemui data yang berdasarkan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa Kota Surabaya merupakan kota dengan UMKM terdaftar yang paling banyak di Jawa Timur.

Gambar 1.1 Data UMKM yang terdaftar di Jawa Timur Tahun 2021



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

([data.diskopukm.jatimprov.go.id](http://data.diskopukm.jatimprov.go.id))

Salah satu bentuk pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan upaya agar dapat mengalami pertumbuhan perekonomian adalah dengan terus berupaya memfasilitasi pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada warga Surabaya yang memiliki usaha atau UMKM termasuk kafe (<https://humas.surabaya.go.id/>). Dengan adanya SIUP akan memberikan manfaat seperti mendapatkan pengakuan secara resmi dari pemerintah sehingga mampu mendapatkan kredibilitas untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memudahkan ketika melakukan pinjaman modal ke bank atau koperasi. Oleh karena itu, demi mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan, pemerintah Kota Surabaya mempermudah perijinan bagi investor melalui Surabaya *Single Window* (SSW) sejak tahun 2013 lalu (<https://surabaya.go.id/>).

Fenomena yang terjadi adalah Pemkot Surabaya mewajibkan semua pemilik usaha kafe untuk mendaftar SIUP. Kepala Satpol PP Kota Surabaya menjelaskan bahwa akan menindak tegas para pelaku usaha kafe yang tidak

memiliki SIUP (<https://radarsurabaya.jawapos.com/>). Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan ada pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pedagang perseorangan bukan berbadan hukum dan penjual kecil seperti pedagang kaki lima, penjual asongan, dan sebagainya yang artinya SIUP dapat diberikan apabila yang bersangkutan menghendaki. Konsekuensi dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya jelas akan berdampak bagi pemilik UMKM kafe yang diwajibkan untuk mendaftar SIUP menjadi memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan atau pembukuan akuntansi terlebih lagi menurut (Rasmikayati et al., 2020) usaha dalam bidang ini sedang sangat berkembang sehingga mengakibatkan menjamurnya di berbagai tempat. Selain itu, Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 mengenai ketentuan standar pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), syarat perusahaan perorangan meminta SIUP yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen yang salah satunya yaitu Neraca Perusahaan. Neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang ada dalam SAK EMKM. Pembuatan Neraca tentu harus mengacu pada standar-standar yang ada dalam SAK EMKM. Sehingga, sangat penting sekali para pemilik kafe untuk menerapkan SAK EMKM dalam pencatatan akuntansi usaha miliknya.

Laporan keuangan yang baik diharapkan dapat membantu para pemilik UMKM dalam mengevaluasi usahanya dan dapat menggunakan hasil evaluasi yang berupa informasi tersebut dalam pengambilan keputusan, juga untuk memperoleh berbagai pendanaan dari lembaga keuangan. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh (Prajatno & Septriana, 2018) masih banyak UMKM yang hanya melakukan pencatatan jumlah kas masuk dan kas keluar, jumlah barang yang diperoleh dan diserahkan pada konsumen yang tidak sesuai dengan SAK EMKM.

Setiap pelaku UMKM seharusnya mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan yang mana dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha sebagai pacuan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi kedepannya serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah digunakan. Laporan keuangan merupakan sebagian kecil dari metode informasi yang digunakan dalam kehidupan ekonomi, khususnya bidang keuangan dan sesuai dengan perkembangan UMKM dalam melaporkan laporan keuangannya (Ariesta & Nurhidayah, 2020).

Berdasarkan (IAI, 2015) Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus

kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menyusun standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah untuk memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan, penyajian dan menyusun laporan keuangan. Jika dibandingkan dengan sistem akuntansi keuangan lainnya, maka dapat dinyatakan bahwa SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh UMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Selain itu, SAK EMKM diharapkan dapat membantu usaha yang dilakukan untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan lain yang lebih luas namun tetap sebanding dengan perkembangan ukuran usaha dan transaksi bisnis yang sedang dilakukan. Masih banyak UMKM yang tidak memiliki kualitas laporan keuangan yang baik karena terlalu fokus dengan pembuatan produk yang inovatif, pendanaan, pemasaran produk, dan kualitas sumber daya yang digunakan. Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan di dalam suatu usaha terkesan apa adanya. Bagi pelaku UMKM yang mengabaikan pengelolaan keuangan mungkin tidak terlalu merasakan dampaknya, sedangkan bisa saja usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi gagal karena

tidak menggunakan metode akuntansi yang efektif. Selain itu, masih banyak juga pelaku UMKM yang masih menggunakan cara kuno ketika mengurus usahanya sehingga keuntungan dalam usaha sering kali tidak diperhitungkan seperti misalnya ketika usaha sedang untung lalu keuntungan tersebut sering kali habis dikonsumsi, bahkan tidak jarang pendapatan yang diperoleh semuanya dianggap sebagai keuntungan, padahal diantara keuntungan yang dimaksud terdapat modal yang terpakai untuk konsumsi. Jika hal tersebut terjadi maka kegiatan usaha akan terganggu dan tidak jarang nantinya akan memberikan dampak yang buruk bagi suatu usaha.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM agar menjadi laporan yang berkualitas ialah tingkat pendidikan, pemahaman teknologi informasi dan ukuran usaha. Berdasarkan (Nainggolan, 2016) Tingkat pendidikan yang rendah dapat dijadikan sebagai alasan ketidakmampuan pelaku UMKM di Kota Surabaya untuk memajukan usaha dan dapat dinyatakan bahwa kebanyakan pemilikan UMKM tersebut memiliki jenjang pendidikan di SMA dan jarang sampai ke jenjang Sarjana. Meskipun demikian, masih banyak juga pelaku UMKM yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi hingga secara khusus mempelajari tentang perekonomian sebelum melakukan bisnisnya agar dapat mengelola usahanya dengan baik dan tepat terutama dalam hal mengelola laporan keuangan. Pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu membawa usahanya menuju kemajuan yang lebih baik karena dengan tingkat pendidikan yang masih rendah akan menyebabkan kemampuan untuk beradaptasi akan menjadi sulit karena pada nyatanya pada zaman sekarang

masyarakat dituntut agar cepat beradaptasi dengan perubahan, namun bukan berarti UMKM dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak dapat maju, hanya saja tingkat kemajuannya akan lebih cepat jika UMKM memiliki sumber daya dengan pendidikan yang tinggi dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha.

Teknologi informasi yang sangat pesat dapat memberikan keuntungan terlebih bagi pelaku UMKM Kafe karena dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengetahui apa saja yang sedang diinginkan oleh pangsa pasar dan juga meningkatkan daya saing usaha untuk memanfaatkan peluang yang dapat digunakan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggap kondisi tersebut sebagai tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi. Pada era saat ini, Pemkot Surabaya menganggap bahwa seharusnya pelaku UMKM bisa menggunakan teknologi secara produktif. Sehingga, pemahaman mengenai teknologi informasi dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi bisa bermanfaat secara maksimal (<https://organisasi.surabaya.go.id/>). Pemilik usaha harus paham akan perkembangan teknologi informasi untuk mempermudah dalam hal pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM karena dengan menggunakan teknologi akan meminimalisir kesalahan pencatatan dan mengefisiensikan waktu dalam pembuatan laporan keuangan. Namun sangat disayangkan, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Hanifah et al., 2020) menyatakan bahwa masih rendahnya adopsi teknologi informasi pada para pelaku usaha mikro. Selain itu, ditemukan pula bahwa masih rendahnya kesadaran akan manfaat dari aplikasi

informasi teknologi UMKM. Oleh karena itu, diperlukan beberapa program untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat informasi teknologi dan juga memiliki pemahaman teknologi informasi harus diterapkan dari SAK EMKM.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan ialah ukuran usaha. (Annisa et al., 2020) berpendapat bahwa semakin kecil ukuran usaha maka pelaku UMKM lebih cenderung tidak peduli terhadap laporan keuangan karena akan cenderung membuat pencatatan keuangan yang sederhana. Sedikitnya UMKM yang menerapkan SAK EMKM disebabkan oleh ketidaktahuan pengusaha kecil tentang pembuatan laporan keuangan yang berkualitas dan rendahnya pengetahuan mengenai akuntansi. Tidak jarang ditemui bahwa pengusaha kecil mengabaikan cara pengungkapan laporan keuangan, karena mereka menganggap laporan keuangan bukan hal yang penting. Sedangkan untuk UMKM yang memiliki ukuran usaha yang besar cenderung memiliki laporan keuangan yang baik guna kelancaran usahanya di masa yang akan mendatang.

Peneliti melakukan studi kasus pada UMKM Kafe karena menurut Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur menyebutkan bahwa tren pertumbuhan kafe ini telah meningkat 16 persen - 18 persen seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan hingga akan sangat disayangkan jika akan mengalami kendala ketika pembuatan SIUP (<https://surabaya.bisnis.com/>). Kota Surabaya dipilih dikarenakan relevan dengan masalah yang peneliti uraikan di atas dan merupakan kota dengan UMKM terbanyak di Jawa Timur dibandingkan dengan wilayah lainnya



berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Teknologi Informasi, dan Ukuran Usaha terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM Kafe di Surabaya”

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM Kafe di Surabaya?
2. Apakah pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM Kafe di Surabaya?
1. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM Kafe di Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penerapan SAK-EMKM pada UMKM Kafe di Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK-EMKM pada UMKM Kafe di Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran usaha terhadap penerapan SAK-EMKM pada UMKM Kafe di Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Menambah wawasan pengetahuan khususnya para akademisi yang sedang menuntut ilmu akuntansi khususnya para mahasiswa jurusan akuntansi.
- b. Dapat menjadi referensi untuk yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pemahaman teknologi informasi, dan ukuran usaha dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan SAK EMKM.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran di dunia akuntansi mengenai akuntansi UMKM.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Dapat menjadi referensi bagi Pemkot Surabaya untuk bahan evaluasi terhadap kebijakan mengenai kewajiban pendaftaran SIUP bagi UMKM.
- b. Dapat memberikan wawasan bagi para pelaku UMKM kafe di Kota Surabaya maupun di kota-kota lain.
- c. Dapat memberikan gambaran bagi Pemerintah Indonesia ketika membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.